

Konservasi Jenis Satwa Endemik melalui Penguatan Masyarakat dan Lembaga Adat di KBA Pegunungan Taunusa (IDN204), Wilayah Ulayat Negeri Honitetu, Kabupaten Seram Bagian Barat

## Laporan Akhir Proyek TOMA Lestari



Periode September 2015 s/d Agustus 2016



**Critical Ecosystem Partnership Fund Wallacea**

Ambon, September 2016

## 1. INFORMASI PROYEK

### Wilayah Pendanaan

- KBA : Pegunungan Taunusa (IDN204)
- Arahan Strategis : 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang **spesifik** bagi spesies Prioritas  
2. Meningkatkan pengelolaan **kawasan** (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi  
3. Mendukung **pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan** yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas
- Judul Proyek : Konservasi Jenis Satwa Endemik melalui Penguatan Masyarakat dan Lembaga Adat di KBA Pegunungan Taunusa (IDN204), Wilayah Ulayat Negeri Honitetu, Kabupaten Seram Bagian Barat
- Nomor Laporan : 01
- Periode Waktu : September 2015 s/d Agustus 2016 (12 bulan)
- Disampaikan oleh : **Yan E. Persulesy – Koordinator TOMA Lst.**
- Tanggal : September 2016
- Tanggal Laporan Berikutnya : -

### HIBAH CEPF

- a. Dalam USD : 20.000.-
- b. Dalam IDR : 260.000.000.-

- Kontribusi mitra : Alokasi staf (4 staf yang di gaji oleh proyek CEPF dan 1 staf kontribusi TOMA)  
Perlengkapan kerja ( ruang kerja yang juga berfungsi sebagai secretariat berukuran 3,3 m x 5,5 m, 2 laptop, 2 printer, 1 scanner, 1 motor, perlengkapan pendukung kantor lainnya; meja, kursi, kipas angin,)

**Kontribusi donor (proyek lain)** : Tidak ada

**Periode Proyek** : September 2015 s/d Agustus 2016

**Lembaga pelaksana** : **TOMA Lestari – Ambon**

## **2. RINGKASAN**

### **2.1. Kondisi dan Perkembangan Program**

#### **2.1.1. TOMA Lestari Sebagai Mitra**

Toma Lestari (selanjutnya disebut TOMA) sebagai lembaga mitra dalam implementasi proyek CEPF Wallacea memiliki kondisi organisasi yang cukup baik dalam mengimplementasikan proyek, sejauh ini semua kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan LFA bisa diimplementasikan, meskipun terdapat beberapa keterlambatan dalam pelaksanaan di lapangan karena adanya beberapa hambatan.

Selama ini ada 4 orang yang terlibat sebagai staf yang terkait langsung dalam sistem tenaga kerja dalam proyek CEPF Wallacea, dan ada 1 staf lagi dilibatkan dalam pekerjaan baik di kantor maupun di lapangan sebagai kontribusi dari TOMA. Adapun komposisi staf Toma dalam proyek CEPF Wallacea adalah sbb:

1. Koordinator Proyek
2. Staf lapangan 1
3. Staf lapangan 2
4. Staf keuangan
5. 1 staf kontribusi. yang membantu kerja staf keuangan dan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek kehutanan masyarakat dan modal sosial.

TOMA Memiliki fasilitas ruang sendiri yang dipakai sebagai Secretariat Lembaga secara mandiri, namun dalam proyek CEPF Wallacea ini terdapat sebuah rumah yang disewakan sebagai kantor program untuk menjalankan proyek. Secretariat TOMA beralamat di Jalan Perumtel RW 04 / RT 001, Kayu Putih – Desa Soya, Ambon. Kode Pos 97129. Sementara kantor program untuk proyek CEPF Wallacea beralamat di Kompleks BTN Wayame Blok 3 N0.20, Kecamatan Teluk Baguala, Ambon.

#### **2.1.2. Kondisi dan Perkembangan Kegiatan**

##### **a. Phase Awal; Periode September 2015 – Pebruari 2016**

Jumlah kegiatan yang harus diimplementasikan oleh TOMA sesuai dengan LFA Logical Framework Analisis) yang di uraikan dalam Activity Tracking; berjumlah 30 bentuk kegiatan. Selain 30 bentuk kegiatan tersebut ternyata terdapat juga pekerjaan-pekerjaan sampingan atau lanjutan yang harus ditindak-lanjuti sebagai proses yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan kegiatan atau bentuk kegiatan tersebut.

Selama phase awal; selama periode September 2015 s/d Agustus 2016 bisa dibilang semua kegiatan berhasil diimplementasikan (*lihat Laporan Quartal 1 s/d Quartal 4 TOMA*). Beberapa kegiatan ikutan yang tidak diatur dan tidak diskenariokan dalam LFA awal juga bisa dikerjakan.

Sejak awal dimulainya kegiatan proyek CEPF Wallacea di bulan September dan Oktober 2015, mulai dari Audiensi dengan pimpinan instansi pemerintah terkait yang berwenang; dalam hal ini BKSDA, Dinas Kehutanan SBB, dan Universitas Pattimura, untuk menjajaki peluang sinergi program, kegiatannya berjalan baik dan umumnya mendapat respon positif.

Sementara kegiatan di lapangan bersama masyarakat juga berjalan cukup baik, mulai dari tahapan sosialisasi menyampaikan maksud dan tujuan proyek, kemudian pertemuan-pertemuan dalam bentuk diskusi formal dan informal serta diskusi dalam bentuk FGD juga berjalan cukup baik. Meskipun ada masyarakat yang bertanya-tanya tentang kegiatan ini dan ada juga yang terlihat skeptis, namun secara umum pemerintah Negeri Honitetu, para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik dan sudah mengikuti pertemuan dan diskusi bisa menerima maksud dan tujuan kegiatan, bahkan ada yang membantu memberi penjelasan kepada masyarakat lain.

Kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan kelompok sasaran yang sensitive seperti masyarakat penambang pohon dan penangkap satwa untuk tujuan komersil, merupakan bagian yang tidak mudah untuk diajak dalam aksi konservasi. Namun sebagian dari mereka bisa dikumpulkan dalam pertemuan diskusi interaktif yang berjalan cukup baik di akhir bulan Nopember 2015. Awalnya sebagian masyarakat penambang dan penangkap ini berpikir kegiatan ini bertujuan untuk menghentikan bahkan akan menangkap mereka dan diserahkan kepada dinas kehutanan dan kepolisian, namun setelah diberi penjelasan mereka bisa memahami. Untuk mereka yang tidak pernah mengikuti pertemuan dan diskusi masih tetap mencurigai kegiatan ini dan masih berpikir bahwa kegiatan ini akan membatasi dan menghambat kerja dan aktifitas mereka di hutan. Sepanjang phase awal perihal ini merupakan tantangan bagi TOMA untuk bisa memberi pemahaman dan sedapat mungkin bisa melibatkan sebagian dari kelompok masyarakat ini ke dalam kegiatan dan pertemuan yang dilaksanakan.

Dalam phase awal ini Kegiatan-kegiatan lapangan yang menyita waktu tenaga dan biaya, berupa studi lapangan untuk mengetahui kondisi status dan populasi jenis satwa endemik beserta habitat dan ancumannya, kemudian Pemetaan wilayah kelola masyarakat dan survey persepsi masyarakat terhadap konservasi jenis endemik dan habitatnya, bisa diselesaikan berkat kerja sama yang baik antara TOMA dengan pimpinan dan masyarakat Negeri Honitetu.

## **b. Phase Akhir; Periode Maret – Agustus 2016**

Memasuki phase akhir pelaksanaan proyek, pada bulan April s/d Juni 2016 ketika pertemuan-pertemuan FGD yang melibatkan lebih banyak orang dari perwakilan 5 dusun dan 1 desa administrasi dalam wilayah adat Negeri Honitetu dilakukan terpusat di Paporisa (tempat pertemuan raja) di dusun Sukowati, dan dilakukannya distribusi materi promosi dan penyadartahuan tentang konservasi kepada masyarakat di dusun-dusun maka semakin banyak perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan proyek dan hal ini semakin memperkuat eksistensi program CEPF Wallacea di mata masyarakat Negeri Hobitetu. Masyarakat melihat bahwa program ini adalah kegiatan yang serius dengan tujuan yang baik, tidak seperti kebanyakan kegiatan yang hanya datang sekali-duakali lalu selesai, namun program ini dilakukan intensif dan berkelanjutan secara periodik dan semakin banyak orang yang diminta untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pendapat, bahkan beberapa orang yang sebelumnya bersifat skeptik juga diundang untuk memberikan masukan dan pendapat. mereka

Perkembangan ini berdampak positif terhadap kelancaran program selanjutnya dan semakin banyak orang dan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian dan dukungan bagi pekerjaan TOMA dan Program CEPF Wallacea. Tidak bisa dibayangkan bahwa semua masyarakat Negeri Honitetu mengetahui dan memahami kegiatan ini karena sebagian masyarakat lebih focus kepada pekerjaan mereka terutama mereka yang memiliki lahan olahan yang jauh dari pemukiman dimana mereka lebih banyak beraktivitas di sana, namun hal yang membesarkan hati bahwa ungkapan-ungkapan skeptis tentang program CEPF Wallacea semakin berkurang.

Dalam phase akhir kegiatan lebih banyak difokuskan kepada kerja pertemuan-pertemuan FGD tingkat Negeri Honitetu dan pertemuan audiensi dengan pimpinan instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi di Ambon dan di tingkat kabupaten di kota Piru, baik itu kerja persiapan pertemuan; kerja pelaksanaan pertemuan; dan kerja tindak-lanjut pertemuan. Sementara pekerjaan yang lain lebih banyak merupakan perbaikan menuju versi final dan/atau tambahan-tambahan elemen kegiatan sebagai proses lanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya di phase awal. Pekerjaan yang banyak menyita waktu juga adalah menyelesaikan laporan-laporan teknis dari kerja-kerja lapangan karena data-informasi dan hasil analisa dari laporan-laporan tersebut digunakan dalam pertemuan-pertemuan FGD di akhir proses kegiatan baik dengan instansi pemerintah maupun pertemuan FGD dengan masyarakat.

## **2.2. Capaian-capaian Penting**

### **a. Phase Awal; Periode September 2015 – Pebruari 2016**

Kunjungan atau pertemuan audiensi kepada pimpinan stakeholder kunci dalam hal ini BKSDA di ambon dan Dinas Kehutanan Kabupaten Seram bagian Barat di kota Piru di awal implementasi proyek untuk sharing informasi dan menjajaki peluang sinergi kegiatan untuk bisa saling membantu mendapat respon positif, hal tersebut menjadi aspek pendorong untuk menghasilkan output yang bukan saja untuk menjawab tujuan akhir proyek CEPF Wallacea tetapi output yang hasilnya harus bisa menjawab kebutuhan tindakan konservasi bagi Pulau Seram khususnya di wilayah Seram bagian Barat menurut pandangan dan rencana kerja instansi pemerintah untuk wilayah ini.

Dalam periode September-Pebruari ini terdapat 3 bentuk kegiatan yang sangat menyita waktu tenaga dan biaya, yaitu:

1. pelaksanaan Studi lapangan untuk mengetahui kondisi status dan populasi jenis satwa endemik beserta habitat dan ancamannya.
2. Pemetaan wilayah kelola masyarakat Negeri Honitetu dalam wilayah KBA Pegunungan Taunusa secara partisipatif.
3. Survey persepsi masyarakat terhadap konservasi jenis endemik dan habitatnya.

Ketiga kegiatan ini yang efektif melibatkan sejumlah masyarakat dalam kerja-kerja lapangan, kunjungan ke rumah-rumah, kunjungan ke kebun-kebun, pertemuan-pertemuan diskusi biasa ataupun dalam bentuk FGD. Bahkan sejumlah kegiatan lain seperti FGD untuk mendorong kesepakatan penerapan SASI bagi jenis satwa endemik dan habitat juga didorong lewat tiga kegiatan di atas.

Keterlibatan sejumlah masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tersebut dirasakan cukup untuk mewakili masyarakat negeri Honitetu, meskipun jumlahnya mungkin belum ideal untuk membuat sebuah gerakan mendorong sebuah aksi tetapi cukup untuk bisa menarik perhatian masyarakat Honitetu secara keseluruhan yang tersebar di 5 dusun.

### **b. Phase Akhir; Periode Maret – Agustus 2016**

Dalam phase ke-2 selama periode Maret s/d Agustus, capaian penting yang berdampak positif pada program adalah terlaksananya pertemuan-pertemuan FGD yang melibatkan perwakilan dari 5 dusun dan 1 desa administrasi dalam wilayah adat negeri Honitetu. Pertemuan FGD ini kami sebut sebagai FGD Negeri karena melibatkan perwakilan dari semua dusun atau kampung dalam wilayah adat Honitetu (wilayah petuanan yang disebut Nuduasiwa). Dalam FGD negeri ini maksud dan tujuan program bisa disampaikan dengan lebih efektif dan beberapa

aktivitas kunci sesuai rencana kerja bisa dicapai lebih efektif juga. Beberapa capaian penting yang di capai lewat pelaksanaan FGD negeri ini adalah:

1. Finalisasi peta wilayah kelola dan peta wilayah negeri Honitetu.
2. Dokument dukungan yang ditanda-tangani oleh peserta bagi pelaksanaan aturan Konservasi jenis satwa endemik dan habitat dengan penerapan hukum adat sasi.
3. Surat Keputusan Raja Negeri Honitetu tentang Konservasi Jenis Satwa Endemik dan Habitatnya.
4. Terlaksananya Workshop Negeri sebagai puncak dari rangkaian FGD yang diselenggarakan bersama masyarakat.

Komponen penting yang menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan FGD Negeri dan Workshop Negeri adalah; tersedianya materi-materi promosi dan penyadartahuan, seperti; poster kalender ukuran A3+ dan poster berisi informasi hasil studi lapangan, berukuran A1, yang cukup sukses menggugah rasa peduli terhadap terhadap keberadaan jenis satwa endemik dan habitatnya.

Sementara capain-capaian penting lainnya yang terkait dengan instansi pemerintah adalah:

1. kunjungan audiensi atau diskusi dengan pimpinan atau key person di beberapa stakeholder kunci seperti; kepala BKSDA Maluku dan kepala Dinas Kehutanan Provinsi di Ambon, kemudian kepala dinas Kehutanan dan key person dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seram bagian Barat. Kunjungan ini mendapat respon yang lebih positif dan lebih bergairah bila dibandingkan dengan kunjungan di awal implementasi program, karena sudah ada cukup data dan informasi yang TOMA/Proyek CEPF Wallacea bisa bagikan kepada mereka.
2. Terlaksananya Semiloka dengan SKPD terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat di Kota Piru, yang dihadiri oleh staf Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Seram bagian Barat dan SSKSDA.

Komponen penting yang menjadi pendukung keberhasilan kunjungan audiensi adalah tersedianya versi final laporan teknis studi lapangan dan laporan analisa perspektif masyarakat terhadap tindakan konservasi. Laporan-laporan ini memberikan kesan yang kuat kepada instansi pemerintah baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten tentang manfaat program CEPF Wallacea bagi program kerja instansi pemerintah dan informasi yang disediakan lewat program CEPF Wallacea bisa membantu mereka dalam proses pengambilan kebijakan ke depan.

**NB:** Pegunungan Taunusa dalam bahasa local Masyarakat Honitetu sebut sebagai **Tounusa**

### **2.3. Kaitan Antara Capaian Dengan Tujuan Akhir Proyek**

Capaian-capaian penting dalam phase awal dan phase akhir implementasi program CEPF Wallacea ini seperti uraian di atas sebenarnya sudah menjawab tujuan akhir proyek yaitu adanya dukungan dan tindakan bagi program konservasi jenis satwa endemik pada KBA Pegunungan Taunusa khususnya wilayah adat Negeri Honitetu, dimana indicator-indikator penting yang ingin dicapai seluruhnya sudah tercapai, seperti;

1. Tersedianya data base satwa endemik dalam format excel
2. Tersedianya laporan teknis studi lapangan tentang “Status Sebaran dan Kepadatan Populasi Jenis Satwa Endemic dan Kondisi Habitatnya”, dan terlaksananya distribusi laporan tersebut kepada stakeholder kunci.
3. Tersedianya laporan persepsi masyarakat tentang “Konservasi Satwa Endemik”
4. Tersedianya peta wilayah kelola masyarakat negeri Honitetu dan penyerahan document petanya kepada pemerintah Negeri Honitetu.
5. Tersedianya bahan dan materi promosi dan penyadartahuan dan terlaksananya distribusi materi tersebut kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
6. Terlaksananya pertemuan-pertemuan FGD Negeri dengan perwakilan masyarakat Honitetu, dengan menghadirkan target kelompok masyarakat yang berbeda sampai terlaksananya Workshop Negeri bagi penerapan aturan konservasi jenis satwa endemik dan habitatnya
7. Tersedianya document dukungan bagi tindakan konservasi jenis satwa endemik dan habitatnya di wilayah adat Negeri Honitetu, sampai dihasilkannya Surat Keputusan Raja Negeri Honitetu tentang konservasi jenis satwa endemik dan habitatnya di wilayah adat Negeri Honitetu.
8. Terlaksananya kegiatan Semiloka dengan SKPD terkait di lingkun pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat.
9. Adanya respon yang sangat positif dari beberapa instansi teknis pemerintah di tingkat Provinsi dan SKPD di tingkat Kabupaten Seram bagian Barat berupa permintaan masukan informasi dan konsep kegiatan sampai ajakan kerja sama program dengan TOMA.

Satu hal penting yang harus di perhatikan bahwa capaian dan output yang dihasilkan bukan saja untuk menjawab tujuan akhir proyek CEPF Wallacea tetapi juga harus bisa menjawab kebutuhan tindakan konservasi bagi Pulau Seram khususnya di wilayah Seram bagian Barat.

### **2.4. Update Resiko dan Asumsi**

Asumsi yang diuraikan dalam LFA di tahap awal implementasi proyek CEPF untuk KBA Pegunungan Taunusa ini adalah: “Situasi keamanan dan sosial terkendali, tidak ada konflik atau kerusuhan maupun bencana alam yang menghambat jalannya proyek”. Dalam implementasi proyek kami melihat bahwa ada asumsi lain



yang muncul yang bisa menjadi asumsi yang mengganggu pencapaian akhir proyek, yaitu; adanya ekspansi usaha perkebunan dalam wilayah KBA Pegunungan Taunusa yang mendapat dukungan pemerintah

Bila dalam phase awal; periode September 2015 s/d Pebruari 2016 implementasi proyek tercatat ada 1 investor yang melirik wilayah Negeri Honitetu untuk dijadikan lokasi izin usaha perkebunan pada Lahan-lahan marga di wilayah Wai Tala khususnya wilayah datar yang disebut oleh masyarakat Negeri Honitetu sebagai "Dataran Nuka" dengan potensi luas lahan mencapai lebih dari 5.000 – 10.000 ha. Maka dalam phase akhir; periode Maret s/d Agustus 2016 tercatat ada perkembangan tentang issue ekspansi usaha perkebunan di wilayah adat negeri Honitetu, dimana sudah ada 2 investor yang melirik wilayah petuanan Honitetu sebagai lokasi pengembangan usaha perkebunan, dimana kedua investor tersebut berniat mengembangkan tanaman pisang nakaba sebagai bahan dasar serat dan tanaman jagung atau singkokng untuk menjadi bahan baku energi terbarukan. Satu investor sudah mendapat izin prinsip dari Gubernur Maluku sementara yang satunya masih sebatas melihat kemungkinan. Satu investor kabarnya dari anak perusahaan PT. Ria Kaltim Plantation dan yang satunya adalah investor Malaysia yang belum diketahui bendera perusahaannya.

Wilayah yang dilirik untuk dijadikan lokasi perkebunan sejauh ini belum terlalu detil diketahui, namun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa; investor dari anak PT Ria Kaltim Plantation melirik wilayah di bagian Timur-Laut KBA Pegunungan Taunusa di wilayah Wai Tala khususnya wilayah datar yang disebut sebagai "Dataran Nuka" dengan luas antara 5.000 s/d 10.000 ha yang meliputi kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi konversi, sementara investor dari Malaysia melirik wilayah di bagian Barat dengan luas yang belum diketahui dan kawasan hutan yang dicakup lebih banyak pada kawasan hutan produksi konversi.

Sejauh ini usaha ekspansi kedua investor tersebut baru mendapat respon dari Pemerintah Provinsi tapi tidak mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, bahkan Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat terkesan menolak dua usaha perkebunan ini. Namun ditahun depan bila terjadi pergantian pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati situasi bisa menjadi berbeda.

Sementara dari pihak masyarakat belum terlalu antusias menanggapi rencana usaha perkebunan ini, ada sebagian masyarakat yang berharap investasi perkebunan itu nanti akan menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka, namun ada juga sebagian masyarakat yang malah khawatir kalau-kalau situasi dan kondisi yang terjadi dikemudian hari bisa sama dengan beberapa desa dan negeri lain di Teluk Elpautih yang akhirnya bermasalah serius dengan pihak perusahaan perkebunan. Selain itu issue lahan-lahan marga dan keluarga pada lokasi yang dilirik investor baik itu statusnya disewa atau dibeli mejadi menjadi issue yang

sangat rumit dan kompleks bila pihak investor mau merealisasikan usaha perkebunan.

Bila ekspansi usaha perkebunan terealisasi sebagaimana yang dikehendaki oleh investor, maka kawasan hutan yang bisa dibidang strategis bagi upaya konservasi di masa depan hanya tersisa pada kawasan Hutan Lindung dan wilayah sempadan sungai-sungai utama di bagian dalam wilayah KBA Pegunungan Taunusa.

Realisasi rencana ekspansi usaha perkebunan dan tentu akan mengurangi luas wilayah KBA Pegunungan Taunusa dari yang ada dalam scenario peta program CEPF Wallacea saat ini untuk wilayah Prioritas Seram dan Koridor Laut Buru, tetapi tidak akan menghilangkan wilayah yang strategis bagi upaya konservasi di lokasi ini, dan juga tidak akan menghilangkan kesempatan untuk upaya pengelolaan wilayah konservasi tingkat tapak di wilayah ini, bahkan bisa jadi muncul kesempatan untuk kolaborasi tindakan konservasi antara usaha perkebunan dengan pengelolaan konservasi di tingkat tapak dikemudian hari.

Asumsi terhadap capaian proyek masih ditambah dengan adanya keinginan Raja Honitetu untuk mengusulkan Hutan Kemasyarakatan atau hutan desa dalam bentuk perkebunan rakyat, yang tujuannya untuk mendapatkan hak kelola bagi masyarakat yang lebih luas didalam kawasan hutan Negara. Namun usulan hutan kemasyarakatan ini bisa juga menjadi peluang penerapan upaya konservasi dengan menggunakan management kolaborasi antara masyarakat dan pengelolaan pada tingkat tapak bagi upaya konservasi dikemudian hari.

## **2.5. Focus Kerja Periode Berikutnya**

Semua tahapan kerja dan bentuk kegiatan yang di agendakan dalam LFA dan rencana kerja proyek Konservasi Jenis Satwa Endemik Melalui Penguatan Masyarakat dan Lembaga Adat di KBA Pegunungan Taunusa (IDN204), Wilayah adat Negeri Honitetu, Kabupaten Seram Bagian Barat sudah bisa diselesaikan dengan capaian hasil yang menurut TOMA adalah BAIK, bahkan bagi TOMA capaian proyek ini bisa dibidang memuaskan.

Focus kerja selanjutnya atau tindak lanjut dari proyek ini adalah: melakukan duplikasi proyek atau program yang sama pada negeri-negeri adat yang lain yang berada dalam wilayah KBA Pegunungan Taunusa, sehingga kajian yang utuh terhadap KBA Pegunungan Taunusa ini bisa dicapai. Hal ini dianggap penting karena capaian yang dicapai lewat proyek CEPF Wallacea di wilayah Negeri Honitetu baru mencakupi 60 % dari wilayah KBA Pegunungan Taunusa.

Kajian yang utuh terhadap wilayah KBA pegunungan Taunusa diperlukan guna memperoleh pemahaman kondisi ekologis yang lebih baik, pemahaman sebaran dan status jenis satwa endemic dan habitatnya lebih banyak, dan pemahaman persepsi masyarakat tentang upaya konservasi yang lebih lengkap, sehingga

rekomendasi dan upaya mendorong KBA Pegunungan Taunusa untuk menjadi Kawasan Konservasi di masa depan bisa dilakukan dengan dasar argumentasi yang lebih baik.

Atas alasan tersebut di atas TOMA mengharapkan program CEPF Wallacea melalui Regional Implementation Team (RIT) dalam hal ini Yayasan Burung Indonesia untuk mempertimbangkan usulan tindak lanjut dari proyek yang sudah dikerjakan oleh TOMA seperti uraian di atas.

### 3. OUTPUT

#### 3.1. Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Adapun target-target kerja dan indikatornya pada tingkat output yang dicapai lewat pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam implementasi proyek ini bisa dijelaskan dalam matrik implementasi kerja di bawah ini.

OUTPUT	INDIKATOR	VERIFIKASI INDIKATOR	KEGIATAN	VERIFIKASI KEGIATAN (Penjelasan)
OUTPUT - 1	1	2	3	4
Data status jenis satwa endemik dan kondisi habitat serta ancamannya digunakan dalam penyusunan keputusan Sasi Negeri untuk mengurangi dan mengendalikan kegiatan menangkap satwa endemik dan menebang pohon pada habitat yang penting.	1. Tersusunnya laporan “status jenis satwa endemik dan kondisi habitatnya serta ancamannya”	1. Data base satwa jenis endemic. 2. Laporan teknis studi lapangan. 3. Dokumentasi kegiatan	1. Survei / Studi lapangan di beberapa lokasi kunci dalam wilayah adat Negeri Honitetu.  2. Data entri & Data base  3. Penulisan laporan teknis studi lapangan “ status jenis satwa endemik dan kondisi habitat serta ancamannya”  4. Distribusi laporan teknis studi lapangan kepada stakeholder kunci	1. Studi lapangan di 4 lokasi dengan berbagai bentuk tutupan lahan dan ketinggian tempat terlaksana, dalam 2 tahap kerja lapangan. yaitu; pada bulan Nopember 2015 dan bulan Pebruari 2016.  2. a). Data base versi draft dalam format excel tersedia. Pada bulan Maret 2016. b). Data base Versi Final dalam format excel tersedia. Pada bulan Juli 2016 .  3. a). Laporan teknis studi lapangan tersedia dalam versi draft Pada bulan Pebruari 2016. b). Laporan studi lapangan Versi Final Tersedia pada bulan Juli 2016.  4. Laporan studi lapangan terdistribusi kepada stakeholder kunci; instansi teknis pemerintah di tingkat provinsi dan SKPD tingkat kabupaten SBB, terlaksana pada awal s/d pertengahan Agustus 2016, sedangkan di tingkat masyarakat (Honitetu)

				terlaksana pada akhir Agustus 2016.
	2. Tersedianya peta wilayah kelola masyarakat Honitetu dalam KBA Peg. Taunusa yang dilakukan secara partisipatif	1. Peta wilayah adat dan peta wilayah kelola. 2. Laporan teknis kerja pemetaan. 3. Dokumentasi kegiatan	1. Kerja lapangan pemetaan wilayah kelola.  2. FGD dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang paham tentang batas dan tanda alam wilayah adat untuk klarifikasi peta wilayah yang sudah disusun  3. Pembuatan peta wilayah adat dan peta wilayah kelola masyarakat Honitetu sesuai prinsip kartografi.	1. Terlaksananya kerja lapangan Pemetaan wilayah kelola masyarakat. Pada bulan Januari 2016.  2. a). FGD penyusunan sketsa awal peta wilayah adat. Terlaksana dari bulan Oktober s/d Nopember 2015. b). FGD klarifikasi peta sketsa hasil observasi lapangan yang dihadiri oleh 4 s/d 5 orang ditiap dusun terlaksana Pada bulan Januari 2016. c). FGD dalam skala yang besar yang disebut " FGD tingkat Negeri " melibatkan perwakilan 5 dusun dan 1 desa administrasi dalam wilayah adat Negeri Honitetu, untuk penguatan isi dan informasi peta. Terlaksana sebanyak 2 kali; pada tgl 8 April 2016 yang dihadiri oleh 23 orang perwakilan, dan tgl 25 Juni 2016, yang dihadiri oleh 22 orang perwakilan. <i>Versi peta draft akhir tercapai.</i> d). FGD tahap akhir; hanya melibatkan para tokoh kunci. Terlaksananya FGD tahap akhir pada tanggal 15 Juli 2016. Versi peta Final tercapai.  3. a). Peta versi Draft-1 tersedia pada bulan Desember 2015 b). Peta versi Draft-1 tersedia pada bulan Januari 2016. c). Peta versi Draft-3 tersedia pada bulan April 2016 d). Peta versi Draft-4 tersedia pada bulan Juni 2016 f). Peta versi FINAL tersedia pada bulan Juli 2016

			<p>4. Penyerahan peta wilayah adat &amp; wilayah kelola kepada Pemerintah Negeri Honitetu</p> <p>5. Penyusunan laporan teknis kerja pemetaan secara partisipatif</p>	<p>4. Penyerahan Peta wilayah adat dan peta wilayah kelola versi Final kepada Pemerintah Negeri Honitetu terlaksana pada akhir Agustus 2016.</p> <p>5. <b>a).</b> Laporan teknis kerja pemetaan mulai disusun bulan Januari 2016, dan Versi Draft tersedia di bulan Maret 2016  <b>b).</b> Laporan teknis kerja pemetaan Versi Final tersedia di bulan Juli 2016</p>
	<p>3. Keputusan Sasi Negeri Honitetu terhadap jenis satwa endemik dan habitatnya dihasilkan dan berlaku.</p> <p><b>Penjelasan:</b> keputusan SASI dari point kegiatan ini didorong dari hasil-hasil kerja lapangan; seperti studi lapangan status, kepadatan populasi satwa endemic, kondisi habitat dan ancamannya. Serta hasil studi persepsi masyarakat tentang konservasi.</p>	<p>1. Dokumen keputusan Sasi</p> <p>2. Notulensi pertemuan</p> <p>3. Dokumentasi kegiatan</p>	<p>1. FGD dengan Pemerintah Negeri Honitetu, tokoh adat &amp; tokoh masyarakat, untuk mendorong Komitmen dan dukungan bagi penerapan aturan Sasi untuk konservasi satwa jenis endemik dan habitatnya.</p> <p>2. Workshop tingkat Negeri Honitetu untuk penguatan kapasitas dan revitalisasi kearifan lokal untuk tujuan konservasi satwa jenis endemik dan habitanya</p> <p>3. Pembuatan Surat Keputusan Raja Negeri Honitetu tentang Konservasi satwa jenis endemik dan habitatnya.</p>	<p>1. FGD nya terlaksana bersamaan dengan FGD Negeri untuk pemetaan; yang melibatkan perwakilan dari 5 dusun dan 1 desa administrasi dalam wilayah adat Negeri Honitetu, sebanyak 2 kali; pada tgl 8 April 2016 yang dihadiri oleh 23 orang perwakilan, dan 25 Juni 2016, yang dihadiri oleh 22 orang perwakilan. FGD ini menghasilkan document dukungan yang ditanda-tangani oleh seluruh peserta.</p> <p>2. Workshop Negeri terlaksananya pada tanggal 27 Agustus 2016 yang secara total dihadiri oleh 57 peserta, dari perwakilan masyarakat Honitetu di 5 dusun dan 1 desa administrasi, serta undangan lain.</p> <p>3. Penandatanganan dan Pengesahan Surat Keputusan Raja Negeri Honitetu tentang Konservasi satwa jenis endemik dan habitatnya, terlaksana dalam Workshop Negeri Honitetu tgl 27 Agustus 2016.</p>

OUTPUT - 2	1	2	3	4
Kapasitas Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Negeri Honitetu diperkuat, sehingga bisa mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konservasi jenis satwa endemik dan habitatnya	1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konservasi satwa endemik dan habitatnya meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat tahu tentang pelaksanaan kegiatan konservasi.</li> <li>2. Laporan persepsi masyarakat</li> <li>3. Adanya Pelatihan on the spot</li> <li>4. FGD dengan Pemerintah Negeri Honitetu, tokoh masyarakat &amp; tokoh adat</li> <li>5. Catatan pertemuan</li> <li>6. Dokumentasi kegiatan</li> <li>7. Cetakan materi promosi dan penyadartahuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi maksud &amp; tujuan kegiatan program CEPF Wallacea.</li> <li>2. Survey persepsi masyarakat tentang konservasi jenis satwa endemik dan habitatnya.</li> <li>3. Pelatihan <i>on the spot</i> kepada kelompok masyarakat terpilih, untuk membantu kerja lapangan koleksi data jenis satwa endemik dan habitatnya</li> <li>4. Pembuatan materi promosi dan penyadartahuan satwa jenis endemik. Berupa poster kalender, poster, poster baliho dan tas kain sederhana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi maksud &amp; kegiatan terlaksana sebanyak 2 kali; Pada bulan September 2015 yang dihadiri oleh 17 orang, dan bulan Oktober 2015 dihadiri oleh 37 orang..</li> <li>2. <b>a).</b> Survei awal persepsi masyarakat terlaksana. Pada akhir bulan Oktober 2015 <b>b).</b> Laporan persepsi tahap-1 mulai disusun bulan Nopember 2015 dan selesai di bulan Maret 2016. <b>c.)</b> Survei persepsi masyarakat tahap-2 terlaksana pada bulan Juni 2016 <b>d).</b> Laporan persepsi tahap-2 mulai disusun bulan Juli dan selesai pada bula Agustus 2016.</li> <li>3. <b>a).</b> Pelatihan on the spot terlaksana sebanyak 2 kali, di 2 lokasi yang berbeda. yaitu Pada bulan Nopember 2015 di Sukowati, dan bulan Pebruari 2016 di Imabatai.</li> <li>4. <b>a).</b> Materi promosi model-1; Poster kalender ukuran A3+, selesai didesain pada akhir Pebruari 2016, dan dicetak sebanyak 400 ex, kemudian dicetak lagi 100 ex pada bulan April 2016. <b>b).</b> Materi promosi model-2; Poster dengan isi materi hasil studi lapangan ukuran A1, selesai didisain dan dicetak pada bulan Mei 2016. sebanyak 20 ex, dan di bulan Agustus 2016 sebanyak 10 ex. <b>c).</b> Poster dengan isi materi hasil studi lapangan ukuran baliho 160cm x 200</li> </ol>

				<p>cm. dan Tas seminar dengan Logo dan pesan Program CEPF Wallacea, selesai didisain pada bulan Agustus 2016 dan dicetak 2 lembar untuk poster ukuran baliho dan tas seminar dibuat sebanyak 80 biji.</p> <p>5. a). Poster kalender ukuran A3+ mulai didistribusi pada bulan April 2016 pada saat FGD Negeri s/d Juni 2016.  b). Poster dengan isi materi hasil studi lapangan ukuran A1 mulai didistribusi pada bulan Juni 2016.  c). Poster dengan isi materi hasil studi lapangan ukuran baliho 160cm x 200 cm. dan Tas kain sederhana dengan Logo dan pesan Program CEPF Wallacea digunakan dan didistribusi pada pelaksanaan Workshop Negeri tgl 27 Agustus 2016.</p>
	<p>2. Pemerintah Negeri Honitetu bersama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat (Saniri Negeri) mampu merumuskan keputusan Sasi Negeri (Sasi Adat) tentang konservasi jenis endemik dan habitatnya</p> <p><i>Penjelasan: keputusan SASI dari point kegiatan ini didorong dari revitalisasi semangat terhadap kearifan local yang sudah dimiliki oleh masyarakat Honitetu sejak zaman leluhur. Tujuan yang ingin capai sama dengan Output 1 Indikator 3, yaitu terbentuknya aturan baru yang terkesan lebih kuat dan lebih mengikat bagi upaya konservasi satwa endemik dan</i></p>	<p>1. FGD dengan Pemerintah Negeri Honitetu, tokoh masyarakat &amp; tokoh adat tentang nilai-nilai kearifan lokal.</p> <p>2. FGD dengan masyarakat yang bekerja sampingan sebagai penebang pohon dan penangkap burung.</p> <p>3. Catatan hasil kegiatan</p> <p>4. Dokumentasi kegiatan</p> <p>5. Dokumentasi rumusan Sasi Negeri bagi perlindungan jenis satwa endemik dan Habitatnya</p>	<p>1. FGD dengan Pemerintah Negeri Honitetu, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang paham dengan nilai-nilai kearifan local dan aturan penerapannya sejak zaman leluhur, <i>untuk merumuskan cara yang tepat untuk membuat keputusan Sasi bagi satwa endemik dan habitatnya.</i></p> <p>2. FGD dengan masyarakat penangkap satwa dan penebang pohon.</p>	<p>1. FGD dengan Pemerintah Negeri Honitetu, tokoh masyarakat dan Tokoh Adat untuk membangun kesepakatan dan merumuskan penerapan aturan Sasi bagi satwa jenis endemik dan habitatnya, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan FGD pembuatan peta wilayah kelola. Mulai dari FGD di tiap-tiap dusun pada bulan Oktober 2015 s/d Januari 2016, sampai FGD Negeri pada bulan April, Juni, dan Agustus 2016.</p> <p>2. a). FGD dengan penebang pohon dilakukan, pada akhir bulan Oktober 2015, bersamaan dengan sosialisasi program CEPF Wallacea yang dihadiri oleh 37 orang .  b). FGD dengan penangkap burung</p>



	<i>habitatnya dalam wilayah adat Negeri Honitetu.</i>			secara khusus tidak dilakukan, karena sesuai dengan petunjuk Raja Honitetu bahwa beberapa orang dari mereka selalu dihadirkan dalam setiap pertemuan FGD Negeri sampai acara Workshop Negeri.
<b>OUTPUT - 3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Adanya sinergi program dengan stakeholder terkait ( <i>BKSDA Maluku, Dinas Kehutanan Kabupaten SBB dan Universitas Pattimura, Lembaga lokal dan media lokal</i> ), dalam bentuk diskusi, berbagi data, informasi, maupun sumber daya untuk mendukung aksi konservasi pada tingkat tapak.	1. BKSDA provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten SBB dan Universitas Pattimura, lembaga adat dan pemerintah Negeri Honitetu mendukung aksi konservasi lewat kegiatan maupun programnya.	1. Catatan pertemuan & diskusi dengan pimpinan / pimpinan Instansi Pemerintah terkait. 2. Copy document Rencana Kerja dan Rencana strategis SKPD terkait yang bisa diinterfensi atau disinergiskan dengan program CEPF. 3. Dokumentasi kegiatan	1. Kunjungan Audiensi starting proyek kepada pimpinan Instansi Pemerintah terkait ( <i>BKSDA, Dinas Kehutanan SBB, Universitas Pattimura</i> )  2. Kunjungan Audiensi Lanjutan kepada pimpinan Instansi Pemerintah terkait ( <i>BKSDA Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Kabupaten SBB, Universitas Pattimura</i> ). untuk menjelaskan hasil kerja dan capaian program  3. Kunjungan penutupan program dengan BKSDA di Ambon dan Dinas Kehutanan SBB di Piru.	1. Kunjungan audiensi kepada pimpinan Instansi Pemerintah terkait di awal implementasi proyek untuk sosialisasi dan minta dukungan serta menjajaki peluang sinergi program, terlaksana Pada bulan September s/d Oktober terlaksana 2015  2. Kunjungan audiensi lanjutan kepada pimpinan Instansi Pemerintah terkait untuk menjelaskan hasil kerja dan capaian proyek serta langkah tindak lanjut. terlaksana di akhir bulan Juli sampai pertengahan Agustus 2016.  3. Kunjungan audiensi penutupan program kepada BKSDA di Ambon dan Dinas Kehutanan SBB di Piru, terlaksana di bulan September.
	2. Dilaksanakannya FGD dalam bentuk semiloka sehari dengan SKPD terkait dalam lingkup Pemda Kabupaten Seram bagian Barat.	1. Catatan kegiatan Semiloka 2. Dokumentasi kegiatan	1. FGD dalam bentuk Semiloka sehari untuk penyampaian hasil kerja dan rekomendasi dari Program CEPFWallacea kepada stakeholder kunci di Kabupaten Seram bagian Barat	1. Semiloka terlaksana pada tanggal 13 Agustus 2016 di kota Piru, diikuti oleh peserta sebanyak 24 orang, dari Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda dan SSKSDA.

	3. Adanya publikasi kegiatan, outpu dan goal proyek di media local	1. Kliping hasil publikasi di media cetak (koran lokal) dan jurnal	1. Membuat materi publikasi untuk dipublikasi pada media cetak di Ambon dan jurnal ilmiah	1. Publikasi kegiatan belum terlaksana, materi publikasinya masih didiskusikan untuk disiapkan. Realisasinya terlaksana setelah penutupan program...
--	--	--	---	--

### 3.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Bulan Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Keterangan
<b>September 2015</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7 - 20	1. Establish Proyek: set up tim kerja, set up kantor, set up peralatan. 2. Kerja persiapan kunjungan awal ke Honitetu .	1. Ambon 2. Ambon & Waimital	
22 - 24	1. Sosialisasi kegiatan tahap-1 di Honitetu. 2. FGD awal peta wilayah kelola.	1. Paparisa Raja Negeri Honitetu. 2. Rumah Raja Negeri Hobitetu.	1. 17 peserta; <i>Raja, staf Negeri &amp; tokoh masyarakat</i> 2. 5 peserta; <i>Raja &amp; staf negeri.</i>
30	1. Kunjungan audiensi ke BKSDA Maluku. 2. Audiensi ke Prodi Kehutanan Unpatti.	1. Kantor BKSDA Maluku – Ambon 2. Universitas Pattimura – Ambon	1. 2 orang pimpinan; <i>Kepala BKSDA &amp; kbid perencanaan.</i> 2. 1 orang pimpinan; <i>Sekretaris prodi kehutanan.</i>
<b>Oktober 2015</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
12 - 17	1. Penyiapan sketsa awal peta wilayah kelola. 2. Kerja-kerja persiapan kerja lapangan.	1. Ambon 2. Ambon	
19	1. Kunjungan audiensi ke kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Seram bagian Barat.	1. Kantor Dinas Kehutanan Kab.SBB – kota Piru.	1. 2 orang pimpinan: <i>Plt kepala dinas &amp; kbid reboisasi &amp; rehablitsi lahan.</i>
20	1. Sosialisasi kegiatan tahap-2 & Pertemuan dengan masyarakat penebang pohon. 2. Observasi studi lapangan tahap-1.	1. Paparisa Raja Negeri Honitetu 2. Wilayah Negeri Honitetu	1. 37 peserta; <i>Raja, Staf negeri &amp; masyarakat penebang.</i> 2. 1 orang pendamping; <i>Staf negeri Honitetu.</i>
20 - 24	1. Survei persepsi masyarakat tahap-1. 2. FGD peta wilayah kelola – lanjutan 1, dan	1. Honitetu: di 3 dusun 2. Honitetu: di 3 dusun	1. 30 responden; <i>dari kelompok umur yang berbeda.</i> 2. 15 peserta; <i>Tokoh adat dan tokoh masyarakat.</i>

	FGD membangun kesepakatan penerapan aturan Sasi bagi satwa jenis endemik dan habitatnya,		
28 - 31	1. Persiapan kerja lapangan. 2. Observasi studi lapangan tahap-2.	1. Ambon & Waimital 2. Wilayah Negeri Honitetu	1. - 2. 2 orang pendamping; Staf negeri Honitetu.
<b>Nopember2015</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	1. Pelatihan on the spot.	1. Honitetu; dusun Sukowati	1. 7 orang; Masyarakat Honitetu dari dusun Sukowati
2 – 11	1. Kerja Studi lapangan tahap-1; <i>jenis satwa endemic dan kondisi habitatnya.</i> 2. FGD peta wilayah kelola – lanjutan 2, dan FGD membangun kesepakatan penerapan aturan Sasi bagi satwa jenis endemik dan habitatnya,	1. Honitetu; dusun Sukowati s/d Wilayah Gn. Wamaturare. 2. Honitetu; dusun sukowati	1. 10 orang pekerja; 3 staf TOMA & 7 orang pendamping masyarakat Honitetu. 2. 4 orang: Raja, staf desa & tokoh masyarakat.
15 - 25	1. Data entri Studi lapangan tahap-1. 2. Penyusunan laporan awal survey Persepsi Masyarakat tahap-1.	1. Ambon 2. Ambon	
26 - 30	1. Kerja pelaporan Quartal 1.	1. Ambon	
<b>Desember2015</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1 - 9	1. Kerja pelaporan Quartal 1.	1. Ambon	
12 - 22	1. Penyusunan laporan studi lapangan awal; status jenis satwa endemic dan habitatnya. 2. Pembuatan peta wilayah kelola & peta wilayah Negeri Honitetu. Draft-1.	1. Ambon 2. Ambon	
<b>Januari 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5 - 6	1. Persiapan kerja lapangan.	1. Ambon & Waimital	
7 – 15	1. Kerja lapangan pemetaan wilayah Adat dan Wilayah kelola. 2. FGD klarifikasi peta sketsa hasil observasi lapangan 3. FGD membangun kesepakatan penerapan aturan SASI untuk jenis satwa endemic.	1. Honitetu; dusun imabatai, Rumatita, Honitetu, Sukowati 2. Honitetu; dusun imabatai, Rumatita, Honitetu, Sukowati 3. Honitetu; dusun imabatai, Rumatita, Honitetu, Sukowa	1. 3 orang staf TOMA & 8 orang pendamping; 2 orang di tiap dusun. 2. 4 s/d 5 orang peserta ditiap dusun 3. 4 s/d 5 orang peserta ditiap dusun
18 – 21	1. Pembuatan peta wilayah kelola dan peta	1. Ambon	

	wilayah Negeri Honitetu. Draft-2.		
24 - 29	1. Penyelesaian laporan Persepsi Masyarakat. Tahap-1. 2. Penyusunan laporan teknis Kerja Pemetaan Partisipatif.	1. Ambon 2. Ambon	
<b>Pebruari 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
9 - 12	1. Persiapan kerja lapangan.	1. Ambon & Waimital	
13 - 21	1. Pelatihan on the spot. Tahap-2. 2. Kerja studi lapangan. Tahap-2 ; <i>jenis satwa endemic dan kondisi habitatnya.</i>	1. Honitetu: dusun Imabatai 2. Honitetu: dusun Imabatai s/d Lembah Wai Tala.	1. 7 orang: Masyarakat Honitetu dari dusun Imabatai. 2. 10 orang pekerja; 3 staf TOMA & 7 orang pendamping masyarakat Honitetu.
22 – 27	1. Data entri hasil studi lapangan. Tahap-2 2. Penyusunan laporan teknis: Status Jenis Satwa endemic & kondisi Habitatnya. Draft-1 3. Disaint materi promosi konservasi Model 1; <i>Poster kalender ukuran A3+.</i>	1. Ambon 2. Ambon 3. Ambon	
28 - 29	1. Cetak materi promosi konservasi model 1. 2. Kerja pelaporan tengah proyek / Quartal 2.	1. Ambon 2. Ambon	
<b>Maret 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1 - 9	1. Kerja Pelaporan Tengah proyek / Quartal 2 2. Penyelesaian laporan teknis Kerja Pemetaan Partisipatif. Draft-1. 3. Penyelesaian Versi Final laporan survey Persepsi Masyarakat. Tahap- 1	1. Ambon 2. Ambon 3. Ambon	
14 - 19	1. Penyusunan Data Base - Jenis Satwa Endemic di KBA Peg. Taunusa. Draft-1	1. Ambon	
21 -25	1. Rancang materi promosi konservasi Model-2; <i>poster dengan informasi hasil studi lapangan, ukuran kertas A1.</i>	1. Ambon	
<b>April 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4 - 7	1. Cetak materi konservasi model-1 tambahan. 2. Persiapan kerja lapangan.	1. Ambon 2. Ambon & Waimital	

8 - 9	1. Pertemuan Formal FGD Negeri ke-1. <i>Mendorong Komitmen dan dukungan bagi penerapan aturan Sasi untuk konservasi satwa jenis endemik dan habitatnya. Dan koreksi penguatan informasi pembuat peta wilayah kelola.</i> 2. Distribusi materi konservasi model-1.	1. Honitetu; dusun Sukowati  2. Honitetu; dusun Sukowati	1. 23 peserta, <i>perwakilan dari 5 dusun &amp; 1 desa administrasi dlm wilayah adat Negeri Honitetu.</i>  2. Dibagikan 7 pihak; <i>perwakilan dari 5 dusun, 1 desa administrasi &amp; kepada Raja Negeri Honitetu.</i>
11 - 13	1. Pembuatan peta wilayah kelola dan peta wilayah Negeri Honitetu. Draft-3	1. Ambon	
26 - 27	1. Persiapan kerja lapangan	1. Ambon & Waimital	
29 - 30	1. Pertemuan Monitoring Tengah proyek  2. Distribusi lanjutan materi konservasi Model-1.	1. Honitetu; dusun Sukowati  2. Dusun Ahiolo	1. 10 prang peserta; <i>perwakilan masyarakat dari dusun Sukowati &amp; dusun induk Honitetu</i>
<b>Mei 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
9 - 25	1. Finalisasi rancangan disaint materi promosi konservasi model 2; <i>poster berisi hasil studi lapangan jenis burung endemik, ukuran A1</i> 2. Cetak materi promosi model-2 3. Bingkai materi promosi model-2	1. Ambon  2. Ambon 3. Ambon	
26 - 31	1. Kerja pelaporan proyek Quartal 3	1. Ambon	
<b>Juni 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1 - 4	1. Kerja pelaporan proyek Quartal 3	1. Ambon	
6 - 18	1. Penyusunan laporan teknis - lanjutan; <i>status jenis satwa endemic dan habitatnya</i> 2. Penyusunan Data Base jenis satwa endemic. versi Final	1. Ambon  2. Ambon	
22 - 24	1. Persiapan kerja lapangan	1. Ambon & Waimital	
25 - 26	1. Pertemuan Formal FGD Negeri ke-2. <i>Tercapai dukungan bagi tindakan konservasi satwa endemic dalam bentuk document dukungan.</i> 2. Distribusi materi konservasi Model-2; poster ukuran A1	1. Honitetu; dusun Sukowati  2. Honitetu	1. 22 peserta, <i>perwakilan dari 5 dusun dan 1 desa administrasi dalam wilayah adat Negeri Honitetu.</i>  2. Dibagikan 7 pihak; <i>perwakilan dari 5 dusun, 1 desa administrasi &amp; kepada Raja Negeri Honitetu.</i>

	3. Survei persepsi tahap-2	3. Honitetu	3. 30 responden.
27 - 30	1. Pembuatan peta wilayah kelola dan peta wilayah negeri Hobitetu. Draft-4	1. Ambon	
<b>Juli 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1 - 5	1. Penyusunan laporan survey Persepsi Masyarakat tahap-2 2. Laporan teknis kerja pemetaan partisipatif. Versi Final	1. Ambon 2. Ambon	
13 – 14	1. Persiapan kerja lapangan	1. Ambon & Waimital	
15 - 16	1. Pertemuan Formal FGD tokoh kunci penetapan peta wilayah kelola & peta wilayah Negeri Honitetu. Versi Final 2. Diskusi tentang isi dan konsiderant Surat Keputusan Raja Negeri Honitetu.	1. Honitetu; dusun Sukowati 2. Honitetu; dusun Sukowati	1. 5 peserta; Raja, staf negeri & tokohmasyarakat yang paham ttg batas wilayah. 2. 5 peserta; Raja, staf negeri & tokohmasyarakat yang paham ttg batas wilayah.
18 - 30	1. Penyelesaian Versi Final Laporan teknis studi lapangan; <i>status jenis satwa endemic dan habitatnya</i> 2. Penyelesaian data base jenis satwa endemic wilayah KBS Peg. Taunusa. Versi Final 3. Disaint materi promosi konservasi Model 3; <i>Poster baliho ukuran 120 x 160 cm &amp; tas seminar.</i>	1. Ambon 2. Ambon 3. Ambon	
<b>Agustus 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1 - 8	1. Kunjungan audiensi dengan BKSDA Maluku. <i>2x kunjungan (tgl 2 &amp; tgl 4).</i> 2. Penyelesaian Versi Final laporan survey Persepsi Masyarakat. Tahap-2.	1. Ambon 2. Ambon	1. 4 orang pimpinan; kepala BKSDA, kepala bidang Perencanaan, Kepala TU, Kepala seksi data & informasi.
10 - 12	1. Kerja persiapan acara Semiloka	1. Ambon & Piru	
13	1. Semiloka dengan SKPD terkait di lingkup Pemda Kabupaten SBB	1. Piru	1. 24 orang peserta; Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda & SSKSDA

	2. Distribusi laporan teknis di lingkup SKPD Kab.SBB	2. Piru	2. Dibagikan kepada 4 pihak; 3 SKPD dan 1 UPT yang hadir dalam acara semiloka.
15 - 18	1. Penyelesaian laporan survey Persepsi Masyarakat. Tahap-2. Versi Final	2. Ambon	
20 - 24	1. Kunjungan audiensi kepada kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. 2. Print peta-peta tematik wilayah negeri Honitetu & Penjilidan laporan teknis studi lapangan; <i>Status jenis satwa endemic dan habitatnya.</i> 3. Cetak materi promosi konservasi model 3. 4. Penyusunan Surat Keputusan Raja Negeri Honbitetu, tentang konservasi jenis satwa endemic dan habitatnya.	1. Ambon  2. Ambon  3. Ambon 4. Ambon	1. 2 orang pimpinan; Kepala Dinas Kehutanan & Kasubag Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan
25 - 26	1. Kerja persiapan Workshop	1. Ambon & Waimital	
27	1. Workshop Negeri Honitetu. Dengan judul: <i>Konservasi Jenis Satwa Endemik melalui Penguatan Masyarakat dan Lembaga Adat di KBA Pegunungan Taunusa, Wilayah Negeri Honitetu, Kab. Seram Bagian Barat.</i> 2. Distribusi materi promosi konservasi model-3. 3. Distribusi laporan teknis studi lapangan. 4. Penandatanganan / pengesahan Surat Keputusan Raja Negeri Honbitetu, tentang konservasi jenis satwa endemic dan habitatnya.	1. Honitetu; dusun Sukowati  2. Honitetu; dusun Sukowati 3. Honitetu; dusun Sukowati 4. Honitetu; dusun Sukowati  5. Honitetu; dusun Sukowati	1. 52 peserta, perwakilan dari 5 dusun dan 1 desa administrasi dalam wilayah adat Negeri Honitetu. 4 orang Narasumber; dari BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku & 2 staf TOMA.  2. Dibagikan kepada 7 pihak; 5 dusun, 1 desa administrasi & kepada Raja Negeri Honitetu 3. SK di tanda-tangani oleh Raja dan ikut mengesahkan 10 orang tokoh masyarakat.
<b>September 2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5 - 30	1. Kerja pelaporan Quartal 4 / laporan akhir.	1. Ambon	

## 4. PEMBELAJARAN

### 3.1. Kegiatan yang Berhasil dengan Baik

Dalam periode September 2015 - Pebruari 2016, terdapat 3 bentuk kegiatan yang sangat menyita waktu tenaga dan biaya, yaitu:

1. Pelaksanaan Studi lapangan untuk mengetahui kondisi status dan populasi jenis satwa endemik beserta habitat dan ancamannya, yang dilaksanakan dalam 2 tahapan kerja di 2 lokasi yang berbeda.
2. Pemetaan wilayah kelola masyarakat Negeri Honitetu dalam wilayah KBA Pegunungan Taunusa secara partisipatif.
3. Survey persepsi masyarakat terhadap konservasi jenis endemik dan habitatnya.

Ketiga kegiatan ini yang efektif melibatkan sejumlah masyarakat dalam kerja-kerja lapangan, kunjungan ke rumah-rumah, kunjungan ke kebun-kebun, pertemuan-pertemuan diskusi biasa ataupun dalam bentuk FGD. Bahkan sejumlah kegiatan lain seperti FGD untuk mendorong kesepakatan penerapan SASI bagi jenis satwa endemik dan habitat juga berhasil didorong lewat tiga kegiatan di atas.

Dalam periode Maret – Agustus 2016, ada 10 kegiatan yang berhasil dilaksanakan yaitu;

1. Penyelesaian Versi Final data base keragaman hayati endemik dalam format excel untuk wilayah adat Negeri Honitetu.
2. Penyelesaian versi Final laporan tekhnis Studi Lapangan Status Sebaran dan Kepadatan Populasi Satwa Jenis Endemik dan Kondisi Habitatnya.
3. Penyelesaian versi Final Laporan Persepsi Masyarakat terhadap Konservasi satwa endemic
4. Penyelesaian laporan pembuatan Peta Wilayah Adat dan Peta Wilayah Kelola secara partisipatif
5. Penyelesaian desaint dan pencetakan materi-materi konservasi bagi upaya promosi dan penyadartahuan.
6. Pertemuan FGD tingkat Negeri yang melibatkan perwakilan dari 5 dusun dan 1 desa administrasi yang ada dalam wilayah adat Negeri Honitetu. Kegiatan ini di laksanakan sebanyak 3 kali. Beberapa capaian penting berhasil dicapai lewat pertemuan FGD ini diantara; Finalisasi peta wilayah adat dan wilayah kelola, dan dicapainya kesepakatan dukungan bagi penerapan aturan konservasi satwa jenis endemik dan habitatnya, yang tertuang dalam document dukungan bagi tindakan konservasi jenis satwa endemik.
7. Pelaksanaan Workshop Negeri yang melahirkan Surat Keputusan Raja Negeri Honitetu tentang Konservasi Jenis Satwa Endemik dan Habitatnya.



8. Pelaksanaan Acara Semiloka dengan SKPD terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram bagian Barat, yang berdampak pada tawaran-tawaran kerja sama terkait issue keragaman hayati dan lingkungan.
9. Pertemuan-pertemuan audiensi dengan instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi dengan BKSDA dan Dina Kehutanan, yang berdampak pada upaya bersama untuk tindakan konservasi yang bersinergis di masa depan.

Kegiatan-kegiatan di atas efektif melibatkan cukup banyak orang, terutama kegiatan 4 s/d kegiatan nomor 6 yang mana bisa melibatkan banyak partisipasi masyarakat dan mampu menarik perhatian hampir semua masyarakat dalam Negeri Honitetu bahkan masyarakat dari desa atau negeri tetangga. Sedangkan kegiatan nomor 7 dan nomor 8 bisa menarik perhatian dan melibatkan sejumlah staf kunci dalam lingkup SKPD di tingkat Kabupaten dan instansi pemerintah terkait di Tingkat Provinsi.

### **3.2. Kegiatan yang Kurang Berhasil, yang Sebaiknya Dilakukan dengan Cara yang Berbeda**

Dalam phase awal implementasi program CEPF Wallacea (periode September 2015 - Pebruari 2016) ada beberapa kegiatan yang masih sulit dikerjakan dan belum menemukan pijakan tahapan pelaksanaan yang kuat dan model yang cocok dalam seperti dalam desain materi promosi. Namun memasuki phase akhir (periode Maret - Agustus 2016), solusi bisa ditemukan dan jalan keluar dari kebanyakan hambatan bisa dikelola, seperti beberapa kegiatan dengan uraian di bawah ini.

FGD dengan penangkap burung yang pelakunya sangat tertutup, mereka tidak mau disebut sebagai orang yang bekerja sebagai penangkap burung karena punya pekerjaan lain yang tetap. Awalnya tim kerja mau memakai cara berdiskusi langsung secara personal dengan mereka, tetapi berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Negeri Honitetu hal tersebut dipandang kurang efektif, karena bisa membuat orang lain yang punya pekerjaan sampingan yang sama bisa merasa takut dan akan lebih tertutup, jadi metode yang dipakai adalah; pemerintah Negeri Honitetu melakukan pendekatan kepada mereka dan mengajak beberapa orang dari masyarakat penangkap tersebut untuk ikut dalam pertemuan FGD Negeri dan dalam terlibat dalam diskusi-diskusi bersama dan menghasilkan kesepakatan bersama. Ternyata cara ini lebih efektif untuk menarik keterlibatan masyarakat yang masih melakukan pekerjaan sampingan menangkap burung untuk berpartisipasi dalam menghasilkan kesepakatan dan keputusan dalam pertemuan-pertemuan FGD Negeri.

Pembuatan materi konservasi untuk promosi dan penyadartahuan selain poster kalender ukuran A3+, sebelumnya ada bentuk sticker dan brosur. namun setelah melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat maka bentuk stiker dan brosur diganti

dengan poster yang berisi informasi hasil studi lapangan status jenis satwa endemik berukuran A1, kemudian poster dengan isi informasi yang sama namun ukuran baliho 160 cm x 200cm, dan tas kain sederhana dengan logo dan pesan program CEPF Wallacea. Pengamatan kami menunjukkan bahwa bentuk-bentuk materi promosi tersebut cocok dengan kebutuhan promosi dan penyadartahuan, dan cukup efektif menarik perhatian masyarakat terhadap program konservasi yang dikerjakan.

Penerapan Hukum Adat SASI bagi upaya konservasi satwa jenis endemik ternyata tidak cocok bila diterapkan secara langsung, dari hasil pertemuan-pertemuan FGD Negeri terungkap bahwa bila aturan sasi diterapkan maka harus ada waktu tutup dan ada waktu buka untuk diambil hasilnya atau dipanen, sedangkan jenis-jenis satwa endemik statusnya masuk kategori terancam dan dilindungi karenanya tidak bisa menerapkan aturan perlindungan dan pemanfaatan seperti aturan sasi, karena waktu untuk melarang dan memanen hasil seperti penerapan sasi biasanya tidaklah dimungkinkan. Berdasarkan kondisi ini maka lahirlah usulan bahwa jenis-jenis endemik ini hanya bisa dipanen bila terjadi kelebihan populasi (over populasi) atau bila ada kondisi lain yang menghendaki seperti sudah mengganggu usaha pertanian atau perladangan masyarakat pada level yang berat. Karena itu diusulkan agar upaya konservasinya ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Raja yang didalamnya mengatur penerapan aturan sasi bila kondisi memungkinkan atau mengharuskan dikemudian hari; seperti uraian di atas. Usulan ini mendapat dukungan penuh perwakilan masyarakat yang hadir dan kemudian merealisasikan Surat Keputusan Raja tersebut dan mengesahkannya dalam acara Workshop Negeri tanggal 27 Agustus 2016. Surat keputusan ini akan menjadi dasar dalam penerapan aksi konservasi dalam wilayah Negeri Honitetu dan selanjutnya akan menjadi pijakan guna penyusunan Peraturan Negeri dikemudian hari.

#### **4. ASUMSI DAN RESIKO**

Setelah 1 tahun implementasi program CEPF Wallacea semakin jelas terlihat adanya asumsi dan resiko ancaman terhadap tujuan besar (Goal) program CEPF Wallacea untuk KBA Pegunungan Taunusa ini, asumsi yang bisa mengganggu pencapaian akhir proyek, seperti diuraikan sebelumnya yaitu: rencana ekspansi usaha perkebunan yang mendapat dukungan dari pemerintah baik di tingkat provinsi dan pusat.

Lahan-lahan marga di wilayah Wai Tala khususnya wilayah datar yang disebut oleh masyarakat Negeri Honitetu sebagai "Dataran Nuka" sangat berpotensi untuk dijadikan lahan perkebunan, lahan yang potensial mencapai luasan 5.000 – 10.000 ha. Lokasi dataran Nuka inilah yang dilirik oleh investor perkebunan untuk dijadikan sebagai lokasi isin usaha perkebunan. Selain itu wilayah bagian Barat KBA Pegunungan Taunusa yaitu wilayah antara hulu sungai Wai Tala sampai wilayah bantaran sungai Wai Ruata juga dilirik oleh investor perkebunan.

Bila investor yang berminat serius mendorong izin usaha perkebunan di wilayah KBA ini, maka kegiatan tersebut akan mempengaruhi capaian akhir proyek pada level Goal. Bentuk dan luas wilayah KBA Pegunungan Taunusa seperti yang di skenarioikan dalam program CEPF Wallacea sangat mungkin akan mengalami perubahan bentuk dan luasan di masa depan.

Namun demikian TOMA meyakini bahwa hal tersebut tidak akan menggagalkan atau menghilangkan tujuan proyek secara keseluruhan pada wilayah ini, tetapi hanya merubah cakupan wilayah yang potensial bagi upaya konservasi. Kondisi bisa berubah menjadi mengancam kawasan KBA secara keseluruhan bila pihak usaha perkebunan memiliki agenda ekspansi yang ambisius terhadap luasan lahan yang ingin mereka dapati.

## 5. STATUS KEUANGAN

Catatan Status Keuangan:

a. Pemasukan	: 247.000.000
b. Pengeluaran	: 260.000.000
c. Kas bon	: 13.000.000
d. Saldo Bank	
Per akhir Agustus 2016	: 0

Status keuangan detail bisa dilihat pada laporan keuangan realisasi proyek.